Buletin Dwibulanan

Pledoi

mendobrak mitos kemapanan

EDISI II/XI/2000

Transparansi Pemilihan Dekan, Kapan..?

Prosesi pemilihan dekan di Fakultas Hukum UGM kurang mendapat perhatian dari mahasiswaHal ini tercermin dari minimnya mahasiswa yang kurang mengetahui siapa dekan baru yang sudah dilantik baru-baru ini. Hal ini dikuatkan oleh Zaenal Arifin M Husein, ketua Senat fakultas Hukum,ia mengatakan bahwa "sebenarnya pemilihan dekan di Fakultas Hukum ini kurang ideal untuk dikatakan sebagai suatu pemilihan yang demokratis", Mahasiswa '97 ini, mengakui memang antusiasme mahasiswa terhadap moment yang satu ini, dirasakan sangat kurang, padahal mahasiswa sebagai salah satu elemen pendukung dalam Fakultas ,hendaknya mempunyai hak yang sama dan mempunyai hak pilih seperti para dosen dan karyawan yang memiliki hak plih tersendiri. Mahasiswa pun terkesan pasrah terhadap hasil pemilihan , karena memang prosesi yang satu ini selalu berlangsung sama dari periode ke periode.

Ada dua penyebab

Dalam kaitannya dengan hal ini ,Zaenal menyimpulkan ada dua hal yang menyebabkan mengapa mahasiswa kurang dilibatkan. Yang pertama ia mengatakan bahawa ," memang harus kita akui sikap apatisme mahasiswa itu sendiri terhadap prosesi pemilihan ini , mahasiswa sebagai salah satu elemen dalam lingkup fakultas kurang memiliki *bargaining power* sehingga suara dan aspirasinya kurang mendapat respon yang bagus dari kalangan atas dalam Fakultas Hukum ini ".

Sebab yang kedua menurut Uceng panggilan akrab Zaenal, juga dipengaruhi pula oleh kurangnya tanggapan pihak Dekanat terhadap aspirasi mahasiswa . Sebab yang kedua

Repro: Internet

Libatkan Semua Pihak....

ini memang harus kita akaui kebenarannya , bila kita mau lebih jeli proses pemilihan dekan ini terkesan mendadak karena tanpa pemberitahuan lebih awal tiba-tiba kuliah libur karena moment yang satu ini . Idealnya dalam sebuah pemilihan dekan hendaknya ada semacam kampannye tentang visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh para kandidat seandainya ia terpilih kelak.

"Oleh karena itu hendaknya kita harus memiliki *bargaining power* agar bisa menyuarakan aspirasi mahasiswa " , demikian penuturan Uceng . langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu akan mengubah lembaga mahasiswa yang ada difakultas kita ini, bukan atas nama BEM atau senat tapi sebuah lembaga yang lebih mampu menyuarakan aspirasi mahasiswa , karena nantinya forum yang satu ini menurut rencana akan berisi berbagai kalangan mahasiswa dan perwakilan dari masing-masing LSO yang ada di fakulta hukum ini.

Komentar Dosen

Saat awak mahkamah mencobameminta tanggapan dosen muda tentang prosesi pemilihan dekan banyak dari mereka yang diam dan bahkan saling melempar dengan alasan tidak memiliki cukup bahan.Namun ternyata tidak semua yang " diam".Adalah seorang dosen muda perdata yang terkenal cukup supel dan familier yaitu Ari Hernawan S.H. Ia menuturkan bahwa dalam sebuah pemilihan yang ideal dan demokratis hendaknya melibatkan seluruh elemen dalam lembaga tersebut, lebih lanjut Ari menuturkan tidak dilibatkanya mahasiswa dalam prose pemilihan ini beliau mengemukakan bahwa," hal ini bukan wewenang dekanat tetapi ini merupakan wewenang dari pihak Rektorat .Bagaimanapun juga secara yuridis proses pemilihan dekan di Fakultas Hukum ini sudah berlangsung secara sah , dan apapun hasilnya hendaknya harus mendapat dukungan dari kita semua ",Ketika di singgung tentang kinerja dekan sebelumnya Ia mengatakan bahwa memang manusia memiliki banyak kelebihan dan kekurangan namun secara keseluruhan Pak Nindyo sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang sudah di gariskan selama beliau menjabat dekan di fakultas ini, hendaknya kita mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payah beliau "Tegasnya. ***(Anang)***

Rencana dan Strategi Kerja Dekan Baru Kita

Setelah pelantikannya tanggal 9 Oktober kemarin. Bapak DR. Burhan Tsani akhirnya resmi menjadi dekan baru Fakultas Hukum kita, menggantikan pendahulunya, Bapak DR. Nindyo Pramono. Dekan baru kita yang lebih akrab dengan sapaan *Pak Burhan* ini juga telah menempati ruangan barunya sebagai Dekan di Fakultas Hukum UGM. Di masa awal satu bulan pertamanya ini di dalam sistem setelah sebelumnya sebagai salah satu staff pengajar studi Hukum Internasional fakultas Hukum kita, Pak Burhan segera kita sapa dengan persoalan *Plattform* kerja yang dimilikinya guna menata dan memperbaiki peran-peran dan fungsi kerja Fakultas Hukum sebagai bagian dari institusi pendidikan.

Ngobrol Dengan Dekan Baru

Sebagai awalannya kami ingin mencari tahu, sebenarnya di Fakultas Hukum kita ini, adakah tradisi transparansi terbuka terhadap agenda program kerja para dekan terpilih ?

Sejauh ini sepertinya belum ada tradisi di mana para dekan terpilih menyusun secara sistematis program kerjanya dan kemudian untuk di sosialisasikan. Tetapi bahwa setiap dekan terpilih mempunyai rencana kerja yang bersifat stategis, itu ada, tetapi memang jadi agak sulit untuk di evaluasi.

Apakah lebih banyak yang merealisasikan program kerja yang mungkin saja, bahkan insidentil ?

ya, mungkin juga begitu yang sering akhirnya terjadi.

Bapak ingin memulai hal baru, dengan menjadi yang pertama mengadakan transparansi program kerja ?

ha, ya bisa saja untuk kepentingan sosialisasi dan mendengar aspirasi.

Ini pertanyaan serius, kami ingin mendengar dan mengetahui program kerja dari Bapak Dekan, yang mana bapak perkirakan ide itu bisa konkret operasional ?

Ya , dalam waktu satu bulan pertama saya masuk dalam sistem ini, atau menjadi dekan baru, mungkin saya akan lebih banyak mempelajari dan mengadakan upaya komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akademik di Fakultas Hukum kita, tetapi yang saya kira sejak awal dan mudah-mudahan dapat berjalan operasionalnya nanti yakni ada beberapa agenda perubahan semisal, yang paling segera ingin kita lakukan adalah mempercepat upaya kelulusan bagi mahasiswa lama yang banyak belum lulus. Berkaitan dengan itu hal yang akan kita lakukan adalah memanggil mereka dan mendengar kesulitan atau kendala mereka, kenapa misalnya mereka terlambat untuk segera lulus, dan kita akan memperhatikan hal apa yang bisa kita bantu dan upayakan.

Program kerja lainnya yang penting segera untuk dilakukan adalah pengadaan sistem komputerisasi bagi penyelenggaraan akademik di fakultas kita. Kedepan nanti segala keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa seperti KRS dan hal-hal lain, mudah-mudahan bisa lebih efisien dengan adanya sistem komputerisasi seluruh aktivitas akademik kita.

Mengenai metode pengajaran yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para mahasiswa, kami kira perlu diperhatikan dan sepertinya harus ada formulasi yang bisa aplikatif di terapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam merancang sistem belajar-mengajar sesuai dengan design kurikulum dan tipologi studi hukum itu sendiri, agar bagaimana suasana belajar-mengajar itu bisa berkembang dinamis dan tidak satu arah saja. Saya kira kita perlu merekayasa secara serius pengembangan metode belajar-mengajar ini jika kita menginginkan mahasiswa yang lebih berkualitas. Bagaimana bapak melihat ini ?

Ya, saya searah dan sangat sependapat dalam hal ini, terimakasih untuk bisa melihat persoalan ini dengan jernih dan tepat. Dalam hal metode belajar mengajar juga menjadi bagian program kerja saya kedepan. Agar bagaimana para staf dosen dan mahasiswa kita bisa *welcome* menerapkan metode *two way participation* atau metode dua arah yang partisipatif antara para mahasiswa sendiri dan mahasiswa dengan dosennya. Hingga sebenarnya bobot pengembangan diskusinya lebih dinamis dan juga kedepan mahasiswa lebih dibiasakan dengan tugas yang bersifat ilmiah seperti paper, essai atau makalah yang kemudian di presentasikan.

Persoalannya apakah ide baik ini bisa wujud secara operasional. Kita punya persoalan dengan performance serta sumber daya dosen kita sendiri. Yang mana jika ingin jujur menilai, semangat dan kesadaran untuk pengembangan kapasitas intelektual dari figur dosen kita, tidak terbantahkan masih sangat minim. Indikator sederhananya mungkin dengan melihat banyaknya dosen kita yang lebih senang dan puas ngendon untuk cukup memberikan kuliah. Jarang sekali dosen kita yang ingin terlibat dalam studi dan diskusi pengembangan studi hukum. Apalagi jadi rujukan pembicara dan nara sumber. Bagaimana bapak melihat masdlah kita ini ?

Iya, sebenarnya dalam hal ini, jelas menjadi tantangan kita. Karena sepenuhnya jika kita ingin melakukan perbaikan proses belajar mengajar akan berkaitan dengan bagaimana kita semua para dosen dan mahasiswa sendiri berupaya untuk meningkatkan sumber dayanya. Khusus untuk para staf pengajar kita di fakultas hukum ini memang perlu di *push* untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya dan aktif dalam kegiatan akdemis dalam masyarakat seperti ikut seminar, diskusi atau kegiatan ilmiah lain. Mungkin pengupayaan untuk membuka kesempatan dan akses melanjutkan sekolah kembali misal, master atau doktoral perlu juga untuk digalakkan ?

Jelas, jika ingin jujur obsesi terbesar saya juga mengupayakan itu. Walau tentunya bukan persoalan mudah.

Ini mungkin pertanyaan klise, tapi selayaknya perlu untuk selalu di ulang-ulang. *Yakni mengenai sarana infra struktur fisik berupa gedung perkuliahan yang selalu di pertanyakan mahasiswa ?*

secara jujur saya ingn menjelaskan bahwa kita telah mempertanyakan dan mengusahakan pembangunan gedung perkuliahan di fakultas hukum kita ini kepada pihak rektorat. Dan memang tidak ada anggaran untuk pengembangan gedung perkuliahan. Yang paling bisa kita lakukan adalah upaya swadaya dari kita melibatkan alumni serta dari program notariat dan ekstensi.

Bagaimana dengan pengembangan fasilitas yang telah ada ?

Ya, yang jelas perlu diadakan penataan sarana dan memfungsionalkan sarana itu se-efektif mungkin. Jika mungkin saya akan menata dan memperbaiki fasilitas perpustakaan kita dan melengkapinya dengan akses internet bagi mahasiswa, mudah-mudahan. *Ya, mudah-mudahan.*

[]

Acoy

Perlukah Laboratorium Hukum ?

Laboratorium Hukum,suatu istilah yang asing di telinga mahasiswa fakultas hukum.Namun keberadaannya sangat diharapkan.Tetapi apakah fakultas ini benar-benar membutuhkan?

Akhir-akhir ini permintaan adanya sebuah laboratorium hukum mencuat lagi.Permintaan ini muncul setelah banyaknya mahasiswa yang merasa kewalahan ketika KKN.Mereka pada umumnya mengalami kesulitan dalam menerapkan ilmu yang mereka dapatkan sewaktu dikampus dengan yang harus diterapkan di masyarakat.Atas alasan tersebut mereka mengharapkan adanya suatu pusat kajian dan penelitian difakultas hukum yang berwujud suatu laboratorium hukum.

Sebelumnya,sekitar 2 tahun yang lalu,permintaaan laboratorium hukum di fakultas hukum UGM pernah muncul.Saat itu,permintaan melalui aksi mogok kuliah yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa hukum ini juga menuntut masalah penambahan dan perbaikan fasilitas belajar-mengajar dan sistem perkuliahan.Wujud nyata dari permintaan waktu itu adalah dengan direnovasinya Ruang I dan selang beberapa waktu kemudian didirikan juga Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH).Pusat kajian dan bantuan hukum yang didirikan untuk menjawab permintaan tersebut ternyata dalam perkembangannya kurang sesuai dengan tujuan diinginkannya sebuah laboratorium hukum.hal ini disebabkan karena dalam perkembangannya PKBH lebih menitikberatkan pada penanganan masalah hukum tidak pada penyuluhannya.

Menurut beberapa mahasiswa yang pulang KKN,mereka mengatakan bahwa dalam prakteknya dilapangan,seorang mahasiswa hukum harus mendasarkan pada kebiasaan yang telah ada di masyarakat dibandingkan harus mendasarkan pada ilmu yang didapatkan dibangku kuliah.Atas kejadian hal tersebut diperlukan suatu laboratorium.Laboratorium yang mereka maksud adalah sebuah wadah untuk penelitian-penelitian hukum,pengkajian serta penyuluhan tentang hukum.

Atas hal ini ,senat sebagai lembaga legislatif yang menampung aspirasi mahasiswa ternyata tidak tinggal diam.hal ini diungkapkan Zainal Arifin selaku ketua senat. "Kami sudah mengirimkan proposal dua kali keatas (Dekanat-Red)"ungkapnya.Ia menambahkan bahwa didalam proposal tersebut juga memuat aspirasi mahasiswa yang masuk lainnya seperti tentang kantin,fasilitas kampus serta tentang parkir diFakultas Hukum.Namun proposal yang diajukan sejak masa dekan lama(nindya)tersebut sampai saat ini belum ada jawabannya.

Menurut dekan Fakultas Hukum,DR Burhantsani,suatu laboratorium hukum akan sangat sulit untuk bisa diwujudkan,ini karena banyak sekali permasalahan-permasalahan difakultas yang lebih penting yang perlu di dahulukan.Seperti;tentang fasilitas ruang kuliah,kantin. "Jadi untuk berfikir kearah dibangunnya suatu laboratorium hukum *kayaknya* belum sampai kesitu" Ujarnya.Namun menurut beliau,jika ada mahasiswa yang ingin mengadakan atau melakukan suatu penelitian,pihak fakultas akan membantunya. "Mahasiswa yang akan melakukan penelitian bisa lewat BEM atau senat melalui bironya kemudian dari pihak fakultas akan membantunya".Tambah dekan yang dilantik tanggal 9 oktober lalu.*Selamat ya...pak.* ■ ***(Armuz)***

MAHKAMAH
BADAN PENERBITAN PERS MAHASISWA FH UGM

mengucapkan

Selamat Atas
Suksesnya Acara Malam Inagurasi

This Ain't A Law Song
with Jikustik

Kutu di Seberang Lautan Kelihatan, Gajah di Depan Mata Tidak Kelihatan

(Sebuah Serpihan Penghisapan di Kampus Kerakyatan)

Berawal dari diskusi kecil di beranda Mahkamah,seorang staf redaksi mengungkapkan kegelisahan dirinya terhadap kesejahteraan karyawan di fakultas Hukum. Hal ini muncul dari kasus corat-coret dinding di Pos Satpam fakultas Hukum yang isinya mengenai ketidakpuasan beberapa karyawan kepada salah satu pimpinannya. Ide ini kemudian masuk ke rapat redaksi Pledooi edisi Oktober ini dengan titik berat berita lebih kepada isu kesejahteraan para karyawan.

Alhasil, penulis bersama seorang rekan lainnya mendapatkan bagian untuk melakukan reportase mengenai keadaan karyawan. Dengan terlebih dahulu melakukan pengayaan wacana dengan membaca data-data sekunder mengenai buruh dan kepegawaian, penulis memulai melakukan wawancara dengan Pak Cipto Subagio (43 tahun), seorang petugas kebersihan di fakultas ini.

Pak Cipto yang berstatus PNS golongan 1 D ini mengaku sudah bekerja selama 14 tahun di fakultas ini. Biasanya jam kerjanya beliau hanya sekitar tujuh jam sehari, namun setelah fakultas hukum ini membuka program ekstensi jam kerjanya bertambah sampai malam dengan status pengupahan yang belum jelas. Bapak dua anak yang hanya bersekolah sampai SLTP ini menceritakan berbagai keluhan yang acap dihadapi oleh para karyawan mulai dari pengupahan yang tidak setimpal sampai dengan tidak adanya rotasi atau promosi kerja. "Saya itu dari dulu ya kerjanya menjadi petugas kebersihan, belum pernah mengerjakan hal lain walaupun pangkat tetap naik," ujarnya.

Selain itu beliau menceritakan juga tentang keprihatinannya terhadap nasib rekan-rekan kerjanya yang berstatus honorer dan juga ketimpangan perolehan upah yang diterima oleh karyawan yang bekerja.di Notariat dengan S 1 sehingga tidak mengherankan kalau hal itu meledak menjadi aksi corat-coret yang isinya bisa dibilang memaki-maki salah satu pimpinan karyawan. Pak Cipto kemudian merekomendasikan kepada penulis untuk melakukan *cross check* berita kepada karyawan honorer sendiri dan tentunya juga ke Kepala Bagian Tata Usaha, Sudaryanto.

Besok malamnya, penulis berhasil mewawancarai salah satu penjaga malam yang berstatus honorer, Enang Suhartono (29 tahun). Mas Enang yang baru bekerja tiga tahun di fakultas ini menceritakan hal yang mirip dengan apa yang Pak Cipto telah ceritakan. Bagaimana dengan gajinya yang hanya Rp. 77.500,-/bulan dan tunjangan kesejahteraan Rp. 75.000,-/bulan (bandingkan dengan UMR Yogyakarta yang mencapai Rp. 192.000,-/bulan) harus bekerja sampingan di siang harinya untuk memberi makan isteri dan dua anaknya yang salah satunya telah bersekolah. Bapak muda tamatan SMA ini mengaku hanya bisa beristirahat sekitar empat jam dalam sehari karena jadwal jaga malamnya dari jam tujuh malam sampai jam tujuh besok paginya. Di rumah orang tua yang ditempatinya sekeluarga, Mas Enang harus membagi waktunya untuk usaha sablonase yang hanya cukup untuk hidup pas-pasan sekeluarga karena isterinya tidak bekerja.

Melihat kerasnya hidup yang dijalaninya, penulis bertanya mengenai jaminan asuransi kerja dan kesehatan para karyawan. Mas Enang mengatakan setiap minggu mendapatkan libur kerja sehari dan apabila ada karyawan yang sakit dibiayai dari iuran kesehatan yang dipotong dari gaji sebesar Rp. 1.000,-/bulan dan dikelola sendiri oleh karyawan. Ketika penulis menanyakan mengenai status kepegawaiannya, Mas Enang mengatakan bahwa dia hanyalah pegawai honorer yang kontrak kerjanya diperbaharui tiap tahun. Mengenai gajinya yang tidak mencapai UMR (Upah Minimum Regional), sebenarnya beliau mengerti namun tidak punya pilihan lain. "pimpinan pernah mengatakan kalau tidak kuat atau tidak kerasan lagi, silahkan cari kerja lain," ujarnya dengan memelas. Akhirnya Mas Enang memilih untuk *nrimo*, namun beliau berharap semoga dengan adanya dekan baru bisa membawa perubahan terhadap nasib karyawan.

Akhirnya penulis melakukan *cross check* berita ke Ka bag TU, Sudaryanto. Dengan ramah, Pak Daryanto menerima penulis di ruang kerjanya. Penulis memulai bertanya dari kasus corat-coret yang banyak ditujukan kepada beliau. Pak Daryanto mengakui bahwa ada saluran yang tersumbat dalam penyampaian pendapat dan di masa yang akan datang beliau mengharapkan supaya karyawan kalau ada permasalahan sebaiknya bicara secara kekeluargaan.

Penulis kemudian mengutarakan beberapa persoalan yang dihadap karyawan, pertama sistem pengupahan yang tidak setimpal dan tidak merata antara karyawan satu dengan karyawan lainnya terutama antara karyawan S 1 dengan Notariat. Kedua, promosi kerja yang tidak jalan sehingga menyebabkan kejemuan dalam bekerja. Ketiga, kesejahteraan karyawan meliputi upah yang penulis katakan tidak memenuhi standar UMR . Menjawab semua itu, Pak Daryanto menceritakan kondisi keuangan fakultas yang belum mampu untuk memperbaiki kesejahteraan karyawan sehingga beliau belum bisa menjanjikan kenaikan gaji. Pak Daryanto hanya bisa menjanjikan akan mengadakan perbaikan manajemen para karyawan dalam satu atap sehingga akan ada pemerataan pendapatan antara karyawan baik itu yang bekerja di Notariat, S 1, Ekstensi, dan Magister Hukum. ■ ***arfi bambani***

UCAPAN

Thank's buat semua pihak yang telah membantu terselenggaranya konser Jikustik kemaren

(Hendry'97)

Menunggu lahirnya Serikat Karyawan UGM

Memang agak rumit untuk mengkategorisasikan status para karyawan apalagi dengan adanya dikotomi antara karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan karyawan yang berstatus honorer. Karyawan yang berstatus PNS memiliki hubungan struktural dengan pemerintah sedangkan karyawan yang berstatus honorer hanya memiliki hubungan dengan universitas dengan penggajian diserahkan kepada fakultas tempatnya bekerja. Jika merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1974 pasal 1 huruf a, pegawai negeri didefinisikan sebagai berikut :

> *Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sedangkan karyawan yang berstatus honorer, oleh Sastra Djatmika, S.H. dan Drs. Marsono dalam buku "Hukum Kepegawaian di Indonesia", dikategorikan sebagai "pekerja" walaupun melakukan pekerjaan yang sama dengan pegawai negeri. Lebih lanjut, menurut Djatmika dan Marsono, jika ada persoalan mengenai hubungan kerjanya, maka yang berlaku bagi mereka adalah peraturan-peraturan yang berlaku untuk pekerja swasta. Dengan kata lain karyawan honorer merupakan buruh yang bekerja untuk fakultas hukum karena memakai hukum perburuhan yang berlaku.

Namun terlepas dari pemakaian yang normatif berdasarkan UU, dilihat secara teknis, Pegawai Negeri baik sipil maupun militer merupakan buruh yang menjual tenaganya demi mendapatkan upah. Bahkan jika berdasarkan UU Kecelakaan 1947 No. 33 pasal 6 ayat (3) sub a dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang bekarja untuk negara dan pemerintah, yang tidak dilindungi oleh peraturan-peraturan pemerintah jikalau mendapatkan kecelakaan, adalah buruh biasa menurut UU ini. Dilihat dari sisi ini setiap orang yang menjual tenaganya pada orang lain seharusnya memiliki hak-hak sipil yang sama. Baik itu yang berstatus PNS, TNI, karyawan honorer, pegawai swasta, dan buruh-buruh industri pada dasarnya merupakan sekedar penamaan akan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Disini sebenarnya harus dimaknai bahwa ada dua jenis buruh, pertama *white collar worker* dan kedua *blue collar worker.* PNS berdasarkan pembedaan ini masuk pada kategori yang pertama, sedangkan buruh yang bekerja di sektor tambang misalnya masuk pada kategori yang kedua.

Selama ini, perlakuan rezim atau pengusaha terhadap buruh—tidak memandang status—belumlah berlaku adil. PNS dan prajurit-prajurit TNI digaji dengan standar gaji yang rendah sehingga menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Buruh-buruh dihisap habis-habisan sehingga melahirkan resistensi dari buruh untuk melakukan perlawanan.

Namun ada suatu ketidak adilan yang lebih parah sebenarnya yang terjadi pada orang-orang yang bekerja pada badan-badan pemerintah termasuk UGM. Sebagai contoh bagaimana susahnya para karyawan honorer di Fakultas Hukum UGM untuk memperjuangkan kenaikan gajinya. Pertama, mereka tidak mempunyai suatu keorganisasian untuk memperjuangkan nasibnya. Kedua, adanya konflik kepentingan antara para karyawan yang bekerja karena adanya perbedaan status antara PNS dan bukan PNS. Tidak adanya kesolidan ini membuat mereka susah sekali bergerak memperjuangkan nasibnya. Ketiga, khusus untuk kasus di Fakultas Hukum UGM, manajemen karyawan yang tidak satu atap menyebabkan adanya diferensiasi gaji walaupun jenis pekerjaannya hampir sama. Karyawan yang bekerja di Notariat UGM mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingkan dengan rekan mereka yang bekerja di S 1 Hukum.

Terpecahnya kekuatan para karyawan ini sengaja dikondisikan supaya posisi mereka selalu dalam keadaan yang lemah, tidak pernah solid dalam suatu ikatan yang kuat. Larangan berorganisasi selain melalui Korpri yang jelas-jelas merupakan korporatisme negara. Di tambah lagi dengan pengaburan posisi mereka misalnya dengan mengatakan bahwa seorang guru atau dosen bukanlah buruh namun merupakan status tersendiri yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sendiri.

Nah, sekarang saatnya setelah sekian lama menggali lebih dalam akan status karyawan, kita memulai suatu paradigma baru bahwa karyawan UGM khususnya fakultas hukum ini tidak dibeda-bedakan statusnya apakah itu PNS, dosen, dan karyawan honorer harus membangun relasi solidaritas bahwa mereka adalah sama-sama buruh yang menjual tenaga dan keterampilannya. Apalagi jika kita buka pasal 44 UU No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja maka dinyatakan bahwa PNS mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat. Kita tegaskan semua subyek hukum mempunyai hak sipil yang sama tanpa membeda-bedakan status yaitu hak untuk berserikat. Mari kita tunggu lahirnya Serikat Karyawan UGM ! ■

arfi bambani

Cerita Si Enang

(Salah satu penjaga malam Fakultas Hukum UGM)

Nama asli ayah beranak dua ini adalah *Enang Suhartono*, pria kelahiran 71' ini mengaku menamatkan sudah SMA-nya. Kehadirannya menjadi penjaga malam di Fakultas Hukum ini ujarnya lebih karena sebelumnya ayahnya juga pernah bekerja sebagai karyawan di Fakultas ini, "jika tidak, saya enggak tahu apakah saya bisa bekerja di sini."

Karyawan yang asli *Jogja* ini, memulai aktivitas kerja-nya sekitar pukul delapan malam hingga pukul tujuh pagi keesokan harinya. Jadi Si *Enang* ini dan dua penjaga malam lainnya setidaknya menanggung beban kerja sekitar 12 jam dalam seharinya.

Patroli malam yang di lakukan *Enang* dan dua teman penjaga malam lainnya menjadi rutinitas sehari-hari buat *Enang* . Pekerjaan-nya sebagai penjaga keamanan lingkungan Fakultas Hukum ini, adalah pekerjaan pokoknya. Walaupun *Enang* juga tahu berbicara mengenai gaji yang dia perolehnya di fakultas ini jauh dari cukup untuk menghidupi diri dan keluarga-nya yang telah memiliki dua anak itu. Enang sebagai penjaga malam di fakultas ini mendapatkan gaji sebesar Rp. 77.500, — bulannya di tambah tunjangan yang sebenarnya Enang sendiri kurang mengerti, yakni ternyata sebesar Rp.75.000. Jadi per bulan-nya *Enang* mendapat gajinya sebesar Rp.162. 500. Buat Enang dengan gaji seperti ini jelas tidak memadai untuk membiayai kehidupan keluarganya sehari-hari, untungnya dirumahnya *Enang* mempunyai usaha sablonase kecil-kecilan yang setidaknya bisa membantu mengatasi beban tanggungan hidupnya. Jika bisa menjelaskan betapa buat mereka, *Enang* dan para penjaga malam lainnya, beban kerja ini terasa begitu berat . Namun sepertinya apresiasi kerja berupa gaji tidak juga kunjung layak buat mereka. Alih-alih mendekati standard kebutuhan sehari-hari-nya. Sebagai seorang ayah seperti juga mungkin para karyawan fakultas lainnya, penghasilan ini menjadi sungguh sangat tidak proposional di bandingkan dengan beban kerja yang harus di tanggungnya. "Jika tidak terkesan terlalu menuntut macam-macam, rasanya memang penghasilan ini sangat tidak proposional," ujar *Enang*.

Malam itu *Enang* memulai seperti biasa aktivitas kerjanya, agak dingin memang cuacanya, lengang menjajari setiap sudut Fakultas Hukum di malam ini. *Enang* mengupayakan dingin-nya malam dengan secangkir kopi yang di buatnya di dapur fakultas. Malam itu *Enang* tidak bisa di temani salah satu rekan kerjanya. Penjaga malam teman *Enang* itu kini sedang menderita penyakit *Typhus, "Itu* di sebabkan cuaca yang kurang baik dan makan yang tidak teratur.Di saat sakit seperti itulah menjadi saat yang paling menyedihkan buat kami para penjaga malam." Kenang *Si Enang*, "tak ada jaminan kesehatan yang mengurusi kami."Lanjutnya. Buat *Enang* dan teman penjaga malam lainnya, sakit tidak boleh terjadi dalam kamus kerjanya. *Enang* tanpa mungkin di sengaja atau dipikirkan sebelumnya oleh dia sendiri, telah menjadi generasi kedua setelah bapaknya.Yang memperjuangkan hidupnya sebagai pengabdi atas pelayanan di Fakultas Hukum kita ini. Sebuah pekerjaan berat yang terasa sunyi oleh kita. *Enang* dan rekan penjaga malam menanggung beban kerja-nya dalam sunyi dan lengang malam. Sayup-sayup kita pernah mendengar protes mereka akan keadaan yang sepertinya tidak kunjung memihak pada mereka.Ya, mereka protes.. seperti kita semua bisa melakukan itu, jika jaminan hidup diri dan keluarga semakin terganggu . Apakah protes para penjaga malam dan mungkin karyawan lainnya itu, jatuh pada waktu dan ruang simpati yang tepat —*secara kebetulan*, dari petinggi Fakultas ?.. kita tidak tahu, yang kita tahu para pekerja itu sedang mengeluh berat . Tapi *Enang* dan para penjaga malam lainnya masih ikhlas bekerja. Walau keikhlasan itu pasti kita tahu di berikannya semata untuk keluarganya di rumah.

Pagi itu *Enang* hampir rampung menuntaskan kerjanya, sampai suasana kampus ramai kembali oleh mahasiswa yang berkuliahan.

Enang pergi senyap ketika keramaian kuliah kita mulai. Ya, mereka memang para *'pekerja sunyi'* seperti pertanyaan yang terjadi setelah rampungnya Tembok Raksasa Cina, yang kemudian dirayakan pembukaanya dalam ceremoni ala penguasa dynasti. Yang jadi masalah, *Dimanakah para kuli-kuli batu-nya itu pergi ?..* ***(Supit).***

Kantinku ,Yang Malang

Meskipun sudah banyak yang "bersuara" tentang kantin di Fakultas Hukum,namun sampai saat ini belum tampak usaha dari fakultas untuk menjawab suara tadi.Sampai kapankah fakultas ini tanpa kantin..?

Kantin,salah satu dari sekian banyak kekurangan diFakultas Hukum.Fakultas yang sudah setahun lebih ini harus hidup tanpa fasilitas ini,akibatnya banyak mahasiswa yang terpaksa "numpang"ke fakultas lain.Menghadapi kenyataan ini,tidak sedikit mahasiswa yang mengatasnamakan pribadi ataupun perwakilan yang menyampaikan permasalahan ini baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal ini melalui senat.Mulai dari Lembaga Semi Otonom(LSO) sampai perwakilan angkatan.

Dua kali lewat proposal

Menyaksikan kurang adanya tanggapan dari fakultas mengenai permasalahan kantin ini,mereka pada umumnya merasa kecewa,bahkan menurut beberapa mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya ke senat ada yang meragukan kerja lembaga perwakilannya. "Apa sih kerja senat kok masalah kantin saja tidak bisa",tegas salah satu mahasiswa yang tidak mau disebut namanya itu.Terhadap hal tersebut,menurut Zainal arifin,selaku ketua senat mengatakan bahwa mengenai permasalahan kantin dan permasalahan lain sudah disampaikan keatas. "Kami sudah menyampaikan hal itu baik secara tertulis maupun secara lesan.Khusus yang tertulis,kami sudah dua kali menyampaikan lewat proposal",Tegasnya.

Lebih lanjut,Ucenk panggilan akrab ketua senat ini menambahkan bahwa usaha tersebut dilakukan saat kepengurusan dekan lama(Nindya-Red).Sedangkan untuk dekan baru ini belum disampaikan.Dalam proposal tersebut selain masalah kantin juga ada tentang masalah parkir,ruang kuliah bahkan masalah perlu adanya sebuah laboratorium hukum.

Senada dengan yang diungkapkan diatas.Salah satu anggota presidium Angkatan 2000 juga mengatakan bahwa masalah kantin difakultas masuk dalam salah satu agenda kerja presidium.

Perlu adanya Potma

Melihat permasalahan-permasalahan diatas,pihak fakultas ternyata sudah mengantisipasinya.Menurut DR.Burhantsani,dekan Fakultas Hukum, mengatakan bahwa suara-suara dari mahasiswa tersebut sangat baik dan membangun.Namun dalam kenyataannya suara-suara tersebut ketika dibawa ke rektorat tidak berhasil.Dalam rapat rektorat beberapa waktu yang lalu,mengatakan bahwa saat ini pihak universitas kekurangan dana,jadi untuk pengeluaran yang digunakan pembangunan fisik tidak mungkin. "Pihak rektorat malah memberi kebebasan kepada fakultas untuk mencari dana sendiri atau swadaya",Ujarnya.Dekan yang dilantik tanggal 9 oktober kemarin menambahkan bahwa dalam usaha swadaya tersebut melalui alumni fakultas,pemberdayaan program di fakultas dan adanya potma.Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan hal ini akan dimulai tahun depan.Ketika ditanya mekanisme swadaya tersebut,dekan yang mengajar mata kuliah Hukum Internasional ini mengatakan bahwa hal tersebut belum bisa dijawab karena kabinet baru belum bisa dibentuk. "Untuk saat ini saya hanya bisa meneruskan program dekan lama,sebab kabinet yang lalu akan berakhir bulan Juni tahun depan",Ujarnya.

Ketika disinggung mengenai alternatif yang lain agar kantin cepat ada,dekan yang memperoleh gelar S-3 di Unpad ini mengatakan, "mungkin ya menggunakan ruang kosong atau yang kurang efektif penggunaannya".Ruang yang dimaksud adalah ruang gudang sebelah utara teater. "Namun begitu,permasalahan yang ada adalah kita kekurangandana".Tambahnya.Bagaimana dengan sistem tender saja pak..?. ■

(@yii)

SERBA HUKUM

Film

Swing Vote
(Kisah Hakim pada MA Amerika Serikat)

A Time to Kill
(Tentang Persamaan di Muka Hukum)

Pelican Brieff
(Masalah Kejahatan Lingkungan)

The Insider
(Tentang Pembocoran Rahasia Perusahaan Untuk Kepentingan Public)

Website

WWW.HUKUMONLINE.COM
(Berita,opini hukum,dan analisa peraturan perundangan)

WWW.INDOHUKUM.COM
(Berita,analisa hukum,konsultasihukum)

selamat bergabung !!

AWAK BARU MAHKAMAH 2000

Eksepsi

"Seribu Tahun" Bersama Jikustik

Ramai lalu lalang jalan socio justicia tidak seperti biasanya. Padahal, hari belum lagi berganti Sabtu. Kemacetan menghinggapi ruas jalan yang menghubungkan sisi sebelah timur fakultas hukum dengan fakultas fisipol. Ribuan massa tumpah ruah di jalan. Fakultas Hukum UGM punya hajatan besar malam itu.

Beruntung kami batal menggunakan motor. Meskipun sepeda yang digunakan terpaksa menahan beban yang melampaui batas. Perlahan, kami berjalan merambat. Satu didepan membuka jalan, sementara teman di belakang mengikuti sambil menaiki sepeda.

Panitia keamanan dibuat kerja ekstra. Sebagian mahasiswa notariat masih berada didalam. Salah atur sedikit, mereka yang ingin keluar fakultas malah bisa memacetkan lalu lalang. Tegur sapa sebentar, akhirnya kami masuk lokasi hajatan. Semua bahan pembicaraan orang malam itu hanya satu, Jikustik. Konser gratis ini memang menyedot animo hal layak luas. Walau sempat didera isu bakal batal tampil, toh akhirnya band asal Djogja itu akhirnya manggung juga.

Aku lirik jam, tujuh tiga puluh wib, sementara acara sudah mulai sejak pukul enam tadi. Aku membetulkan letak tas punggung, lantas bergegas menuju ruang I yang telah disulap menjadi spoot-hall layaknya Kridosono. Dentuman alat-alat musik terdengar bersahutan menimpali ceria vokalis band-band pendamping. Antusias para penonton terlihat dari kerelaan mereka berdiri berdesakan di ruangan konser dadakan yang sebenarnya hanya muat 400 orang.

Rencanaku untuk mengabadikan gambar terpaksa batal. Terlalu beresiko memaksakan diri masuk kedalam. Setiap orang benar2 mempertahankan area berdirinya masing-masing. Rapat barisan mereka tampak tak ubahnya seperti satuan dalmas yang tengah menghalau para demonstran. Tiba suara teriakan "huu...." terdengar dari arah pononton. Pada saat yang bersamaan seseorang, entah siapa, iseng menyalakan lampu utama ruang I. Jadilah susana konser yang semula gelap hanya berhiasakan tarian lampu panggung sedikit terganggu.

Bersama temanku tadi, kami meninggalkan sisi barat ruang I. Beberapa teman redaksi tampak terlihat santai duduk di teras kantor MAHKAMAH. Kamipun datang menghampiri. Dari obrolan singkat, aku dapat informasi kalau band utama (Jikustik.red) tengah berada diruang istirahat dosen lantai 2, sambil menunggu jatah tampil mereka yang diperkirakan tepat pukul delapan nanti. Daya tarik Jikustik memang luar biasa.

Pintu sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan fakultas ekonomi dan filsafatpun tak luput dari serangan penonton. Mereka yang menghindari kepadatan ruas jalan Socio-Justicia bebas berlalu lalang melalui jalur tersebut. Segerombolan remaja usia belasan tahun asyik mencermati sampul Jikustik yang mereka bawa. Sorot mata mereka seolah tak sabar menanti para bintang pujaannya.

Kurang sepeluh menit sesuai jadwal yang direncanakan, aku sudah berada di depan pintu sebelah timur panggung. Disana nantinya Pongky, Icha, Dadi, Adit dan Carlo – para personil Jikustik – akan memasuki panggung. Dari kejauhan sekitar 20 orang berpakaian hitam-hitam membentuk dua barisan kokoh, berjalan cepat menuju pintu utama menuju panggung. Histeria massa – yang kebanyakan Anak Baru Gede (ABG) – memecah keheningan malam. Mereka berebut mendekati rombongan Jikustik. Sedikit kegaduhan terjadi tatkala salah seorang tim Jikustik terpisah dari romobingan dan kesulitan memasuki ruangan.

Suasana ruangan yang dipadati nyaris seribu orang itu terasa gerah. Enam kipas angin yang ada tidak mampu menggerakkan udara yang sudah terlanjur bercampur dengan asap rokok dan panas tubuh manusia yang ada didalamnya. Jadilah malam yang dingin itu, harus ditambah peluh yang mengucur. Mereka semua terhanyut dalam satu gerakan harmonisasi nada setiap lagu yang dibawakan Jikustik.

Band yang cukup matang pengalaman ini (karena sebelumnya mereka lebih banyak tampil di kafe) sekali lagi menunjukkan kepiawaian mereka dalam memainkan emosi penonton. Ketika tembang "Saat Kau tak Disampingku" yang dilantunkan dari mulut manis Icha, serempak para penonton tanpa dikomando ikut menyanyikan lirik bait demi bait. Hampir semua lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu yang terangkum dalam almbum perdana yang diberi tajuk Seribu Tahun.

Sementara di luar gedung, penonton yang tidak kebagian tempat nampak tetap menikmati penampilan Jikustik. Rintik hujan yang mengguyur tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap menggerakan tubuh. Seorang remaja usia tanggung, asyik menggoyangkan tangan diatas kepala sembari sesekali ikut menyanyikan syair lagu yang di dendangkan. Insiden kecil sempat terjadi disebelah barat gedung , tatkala salah satu pintu yang dijaga panitia dipaksa masuk oleh para penonton. Kayu ukuran satu setengah kali dua meter itupun roboh. Beruntung sebelumnya telah mencopoti semua kaca yang ada setiap sisi gedung ruang I.

Pesta Jikustik malam itupun berakhir dengan lagu pamungkas, "Maaf". Konser yang di dukung sepenuhnya oleh PT Bentoel Yogyakarta ini cukup menjadi obat mujarab para mahasiswa sebelum minggu depan giliran mereka yang akan manggung di arena Mid-Semester. ■

doel

DITERBITKAN OLEH

MAHKAMAH

BPPM FH UGM

pemimpin umum:wt.wibowo
sekretaris umum:syarifudin
staff sekretaris umum:ari
pemimpin redaksi:hertasning ichlas
pemimpin perusahaan:agus setiawan
Ka.Litbang:dina mariana
Bendahara:Santy
Staf Redaksi:cici,rara,Arfi,ayik,hafid,anang ,tutin,erna,ima,wayan,retno ,sangkot,ira,supid,hosnu,fira,uchenk, angga,rahmi
staf Perusahaan:agung,hendry
Layout/Edit:Dodo
Alamat redaksi:
Jl.SosioJusticia I Bulaksumur Yogyakarta
Telp.(0274) 512781,901280
Fax.512781
Email:mahkamah@eudoramail.com
Ama@yogya.wasantara.net.id